

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, I Dewa Gede. dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018. *Teori-teori Hukum*. Setara Press, Malang.
- Ali, Zaenuddin, 2017, *Hukum Islam*. Sinar Grafika, Bandung.
- Algra, N.E., 1974, *Black Law's Dictionary*. Tjeenk Willink, Groningen.
- , 1974, *Including tit Het Netherlands Privaatrecht*. Tjeenk Willink, Groningen.
- Aprita, Serlika, 2018. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Setara Press, Malang.
- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajri, Zul, Em dan Ratu, 2007, Aprilia Senja. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta.
- Hakim, Endang, dan, Hakim, Lukman, 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Deepublish, Yogyakarta.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2015, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, Rudy, 2001, (Ed.). *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- Maru Hutagalung, Sophar, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta

Muljadi, Kartini, 2001, *Actio Paulina dan Pokok-Pokok Tentang Pengadilan Niaga*, Dalam: Rudhy A Lontoh et. Al, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*: Alumni, Bandung.

Muljadi, Kartini, 2000, *Pengertian dan Prinsip – Prinsip Umum Hukum Kepailitan*. Makalah Hukum, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2020, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumannya*. Prenadamadia group, Jakarta.

Nurdin, Andriani, 2009. *Buku Pedoman Hakim Pengawas tentang Penyusunan Penetapan (Naskah Uji Coba)*. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jakarta.

Otto, Jan Michiel, 2003, *Reele Rechtszekerheidin Ontwikkelingslanden.* Terjemahan Tristam Moeliono, *Kepastian Hukum yang nyata di Negara Berkembang*. Cetakan Pertama. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN-RI), Jakarta.

Priyo Amboro, Yudhi, 2020, *Hukum Kepailitan (penerapan hukum kepailitan pada korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia)*. Setara Press, Malang.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Retnowulan, Sutantio, dan, Iskandar, Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Remy, Sjahdeini, Sutan, 2022, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverodening Juncto UU No. 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2010, *Hukum Kepailitan memahami undang-undang No, 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. PT Pustakan Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2009, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004*. Grafiti, Jakarta.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2011, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung..

Soebekti, 1995, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*. Soeroengan, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimet*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Shubhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sinaga, Syamsudin, M, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Wijayanta, Tata. *Undang Undang dan Praktek Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*. Gadjahmada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata dan, Bagas, Muhammmad, 2016, *Cross BorderInsolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, dan, Hery, Firmansyah, 2011, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata, 2013, *Penyelesaian Kes Kebangkrapan di Mahkamah Tinggi Malaysia dan Pengadilan Niaga di Indonesia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

B. Jurnal

Hari Sutra, Disemadi, dan, Gomes, Danial. Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Persepektif Hukum Kepailitan Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganessa*, Bali, 2021, hlm. 127-129.

Kurnia, Titon Slamet, Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir” Refleksi Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi April 2015, hlm. 16-19

Julyano, Mario, dan, Yuli Sulistyawan, Aditya, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Credipo*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 20-31.

Larasati, Nandhi, dan, Ayu Dyah Satyawati, Ni Gusti, 2014, Tinjauan Yuridis pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum-Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 2007, hlm. 101-111.

Manullang, Fernando M, 2022, Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2, hlm. 459.

Mulyanto, Ahmad Dwi, 2022, Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit, Asas Wa Tandhim, *Jurnal Hukum, Pendidikan, & Sosial Keagamaan-Fakultas Agama Islam Universiats Cokroaminoto*, Yogyakarta, hlm. 161-172.

Nicky, Yehezkiel, Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga, *LEX PRIVATUM*, hlm. 229-239.

Palaniappan, Metchi, 2002, *Research Paper on Bankruptcy/Insolvency Law in Various Countries Generally with Particullar Attention Focused on the effects and consequences of bankruptcy of the applicant and insolvency of the issuing bank in relation to letters of credit under united states law*

Pendapat Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.

Simanjuntak, Ricardo, Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasal Modal, *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, Jakarta, hlm. 57 - 58

Widowati, Christiani, and Tata Wijayanta, 2020 “*The Dialectic Study on the Legal Findings by the Judge as a Criticism and Support to Legal Positivism*”, Vol. 12, *Journal of Talent Development & Excellence*, hlm. 1498 – 1510.

Wijayanta, Tata, 2004, *Kajian tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum*, Volume 26, Nomor 1, Februari, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 1 - 13.

Wijayanta, Tata,, 2010, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta. hlm. 330 - 346.

Wijayanta, Tata, 2014 Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 216 - 226.

Wijayanta, Tata, 2007, “Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan”, *Jurnal Legality*, *Majalah Hukum Legality Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)*, Malang, hlm. 128 - 141.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 -23)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
109/KMA/SK/IV/2020.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 19/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2022/PN.Jkt.Pst., jo. 175/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 175/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.